

EKONOMI SUBSIDI

Indonesia vs India: Mengapa India Berhasil, Indonesia Belum

Case study: Aadhaar + PAHAL vs DTKS + tabung biru tanpa verifikasi. Angka per angka, infrastruktur per infrastruktur.

FORMAT

Case Study

ESTIMASI BACA

6 menit

UNTUK

Pembuat kebijakan, peneliti kebijakan publik, mahasiswa ilmu pemerintahan

India dan Indonesia punya masalah yang sama: LPG bersubsidi yang dikonsumsi orang yang tidak berhak. India mulai menyelesaikan masalah ini pada 2014 dengan PAHAL. Hasilnya: 40,8 juta identitas palsu dieliminasi, US\$6 miliar dihemat, tingkat keluhan 0,08%. Indonesia masih punya 40,3 juta pelanggan LPG bersubsidi tanpa verifikasi identitas. Ini perbandingan sistem dua negara dengan populasi berbeda skala tapi masalah yang identik.

Titik awal yang sama

ASPEK	INDIA (PRE-2014)	INDONESIA (SEKARANG)
Sistem subsidi LPG	LPG bersubsidi dijual bebas tanpa verifikasi penerima	LPG 3 kg dijual bebas tanpa pengecekan KTP
Masalah utama	Koneksi LPG palsu, duplikat, tidak aktif menyedot subsidi	40,3 juta pelanggan tanpa filtering siapa yang berhak
Database miskin	BPL (Below Poverty Line) list, bermasalah sama seperti DTKS	DTKS dengan 21 juta data duplikat yang sudah dihapus
Infrastruktur digital	Awal PAHAL: belum ada Aadhaar universal	OJK 2024: inklusi keuangan 75%, e-wallet meluas

Apa yang India bangun: Aadhaar + PAHAL

01 Aadhaar (2009-2024)

Sistem identitas biometrik: 12 digit unik, foto, 10 sidik jari, 2 pemindaian iris. Cakupan per Juli 2024: 1,38 miliar orang, 99,9% populasi dewasa. Dibangun dari nol selama 15 tahun.

02 PAHAL/DBTL (2014)

Direct Benefit Transfer for LPG. Mekanisme: konsumen beli LPG dengan harga pasar. Subsidi dikreditkan langsung ke rekening bank yang terhubung Aadhaar. Bukan subsidi di harga. Subsidi di rekening.

03 Hasil eliminasi

40,8 juta koneksi LPG yang duplikat, palsu, tidak eksis, atau tidak aktif diblokir. Ini bukan orang miskin yang kehilangan subsidi. Ini identitas yang tidak punya penerima nyata.

40,8 juta

KONEKSI LPG PALSU/DUPLIKAT
DIELIMINASI

US\$6 miliar

PENGHEMATAN DARI REFORMASI
LPG SAJA

US\$32 miliar

TOTAL PENGHEMATAN DBT
SELURUH PROGRAM S/D MARET
2024

0,08%

TINGKAT KELUHAN DARI 19,4
MILIAR TRANSAKSI LPG 2024-
2025

Indonesia: apa yang sudah ada vs apa yang kurang

LAKUKAN

- ✓ NIK (Nomor Induk Kependudukan) sudah ada untuk hampir seluruh penduduk dewasa.
- ✓ DTKS sudah ada, sedang diperbaiki dengan New DTKS update bulanan.
- ✓ Inklusi keuangan 75,02% (OJK 2024). E-wallet menjangkau pedesaan.
- ✓ BLT sudah 4 kali dilakukan: 2005, 2008, 2013, 2020. Mekanisme transfer ada.

HINDARI

- ✗ NIK belum terhubung ke transaksi pembelian LPG di warung dan pangkalan.
- ✗ DTKS belum diintegrasikan dengan mekanisme pembelian LPG real-time.
- ✗ 25% belum terinklusi secara keuangan, terkonsentrasi di daerah terpencil.
- ✗ Belum ada political will untuk melaksanakan DBT LPG secara sistematis.

KESIMPULAN YANG TIDAK NYAMAN

Indonesia punya NIK, DTKS, e-wallet, dan preseden BLT. Infrastruktur dasarnya 70-80% siap. Yang kurang bukan teknologi. Yang kurang adalah keputusan politik untuk menghubungkan semua infrastruktur itu menjadi satu sistem verifikasi subsidi yang jalan. India butuh 5 tahun dari Aadhaar ke PAHAL. Indonesia butuh berapa lama dari NIK ke reformasi LPG yang sistematis?

DOKUMEN INI BAGIAN DARI SEBUAH BUKU

Ekonomi Subsidi

Mengapa Indonesia Membayar untuk Tetap Miskin

Dokumen yang baru saja kamu baca adalah ringkasan dari satu sudut pandang di buku ini. Isi lengkapnya mencakup 11 bab, audit angka per angka, dan studi banding negara lain. Baca versi lengkap di Google Play Books.

Baca buku lengkap di Google Play Books

Ekonomi Subsidi tersedia di Google Play. Format e-book, bisa dibaca di ponsel, tablet, atau browser. Pembelian satu kali, akses selamanya di akun Google kamu.

[Buka di Google Play Books >](#)

<https://play.google.com/store/books/details?id=0gDLEQAAQBAJ>

DOKUMEN PENDAMPING LAINNYA

01 Audit subsidi di dapur · hitung subsidi yang masuk dan keluar rumah tangga kamu

04 Cheatsheet subsidi vs tax expenditure · bedanya subsidi "terlihat" dengan insentif pajak

08 Indonesia vs India · apa yang bisa ditiru dari Aadhaar + PAHAL

TENTANG PENULIS

Hibranwar adalah praktisi dan penulis. Dokumen ini No. 08 dari 10 pendamping buku "Ekonomi Subsidi". Boleh dibagikan, dicetak, dan dikutip dengan atribusi.

KONTAK & KANAL

Web: hibranwar.com

Buku: [Google Play Books](#)

© 2026 Hibranwar. CC BY 4.0 · Versi 2026.04.24